

# KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Selasa, 21 Mei 2019



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT

## DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Republika (Halaman 1)	Selasa, 21 Mei 2019	Ratusan Km Tol Trans Sumatra Difungsikan	Sejumlah ruas Tol Trans Sumatra akan dioperasikan secara fungsional selama arus mudik dan Lebaran 2019. Keberadaan tol fungsional dibutuhkan untuk menyambung ruas tol yang telah resmi beroperasi. Ini untuk mempermudah dan mempercepat pemudik dari Jawa berlebaran di kampung halamannya.
2	Republika (Halaman 24)	Selasa, 21 Mei 2019	Rumah Menteri Pun Ikut Tergusur Proyek Tol	Kediaman Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terpaksa harus ikut terdusur. Pasalnya, Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) akan melintas di area rumahnya itu. Padahal, proyek tol tersebut berada di bawah naungan kementeriannya sendiri.
3	Media Indonesia (Halaman 2)	Selasa, 21 Mei 2019	Berita Foto	Presiden Joko Widodo bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua dari kiri), Gubernur NTT Viktor Laiskodat (kedua dari kanan), dan Bupati Belu Willy Lay (kiri) menebar benih ikan pada peresmian Bendungan Rotiklot di Belu, Atambua NTT, kemarin. Bendungan yang dibangun di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste itu mampu mengairi 139 hektare area persawahan dan 500 hektare tanaman palawija serta mengalirkan 40 liter per detik kebutuhan air baku bagi warga Kota Atambua.
4	Media Indonesia (Halaman 2)	Selasa, 21 Mei 2019	Presiden Makmurkan Warga NTT dengan Air	Presiden Joko Widodo menekankan kunci kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat NTT ialah air. Dengan air, masyarakat bisa menanam sendiri bahan kebutuhan pokok mereka, bahkan bisa mengekspor ke negara tetangga, Timor Leste.
5	Media Indonesia (Halaman 6)	Selasa, 21 Mei 2019	Berita Foto	Jalur alternatif mudik lintas barat Jambi-Sumbar di Petajen, Bajubang, Batanghari, Jambi, kemarin. Jalur lintas barat yang menghubungkan Kota Jambi-Muarojambi-Batanghari tersebut dapat digunakan pemudik dari arah Kota Jambi menuju Padang, Sumatra Barat, atau sebaliknya untuk mempersingkat waktu tempuh, tetapi perlu meningkatkan kewaspadaan utamanya pada malam hari karena melintasi perkebunan dan minim kampu penerangan jalan.
6	Media Indonesia (Halaman 19)	Selasa, 21 Mei 2019	REI Siap Bangun Ibukota Baru	Pemerintah perlu melibatkan pemangku kepentingan yang ahli pada tiap-tiap bidang, termasuk pelaku usaha dalam pengembangan ibukota baru.
7	Kompas (Halaman 1)	Selasa, 21 Mei 2019	Lintas Timur Sumatera: Perbaikan Selesai Sebelum Masa Mudik	Jalan Lintas Timur Sumatera menjadi jalur alternatif dan rute pengalihan bagi pemudik yang tidak menggunakan jalan tol. Meski demikian, masih ada jalan rusak yang mengganggu laju kendaraan. Perbaikan jalan pun berpacu dengan akan dimulainya masa mudik Lebaran.
8	Kompas (Halaman 13)	Selasa, 21 Mei 2019	Rumah Subsidi: Menyejahterakan Rakyat	Pangan, sandang dan papan adalah kebutuhan dasar sekaligus tolok ukur kesejahteraan sebuah bangsa. Sementara tujuan dibentuknya negara salah satunya menyejahterakan rakyat.
9	Kompas (Halaman 16)	Selasa, 21 Mei 2019	Habitat Gajah Prioritas di Jalan Lingkar Luar Duri	Pembangunan proyek jalan lingkar luar di wilayah Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau, sepanjang 33 kilometer berkomitmen tidak mengganggu jalur lintasan gajah liar. Gajah-gajah itu ada di kawasan eks Suaka Margasatwa Balai Raja yang kian terdesak habitatnya.

10	Kompas (Halaman, 17)	Selasa, 21 Mei 2019	Pemda di NTT Didorong Optimalkan Bendungan	Pembangunan bendungan merupakan kunci untuk mengatasi kekeringan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di NTT. Bendungan yang dibangun pemerintah pusat dengan dana miliaran hingga triliunan rupiah itu menjadi tidak berarti jika pemerintah daerah tidak memanfaatkannya secara optimal bagi kemakmuran rakyat.
11	Kompas (Halaman, 20)	Selasa, 21 Mei 2019	Berita Foto	Panorama Jakarta di area Sudirman, Jakarta Pusat, Senin(20/5/2019) malam. Wajah ibukota terus berkembang menuju megapolitan yang semakin padat. Pemerintah memiliki rencana mereduksi fungsi Jakarta hanya menjadi pusat bisnis dengan memindahkan ibukota ke luar Jawa.
12	Bisnis Indonesia (Halaman, 1)	Selasa, 21 Mei 2019	Berita Foto	Presiden Joko Widodo bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, dan Bupati Belu Willy Lay menghadiri peresmian Bendungan Rotiklot di Belu, Atambua, NTT, Senin (20/5).
13	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Selasa, 21 Mei 2019	Operator Tol Panen Rezeki	Astra Infra, subholding PT Astra International Tbk. di sektor infrastruktur, memperkirakan volume lalu lintas atau trafik kendaraan di empat ruas jalan tol bakal meningkat berkisar 15%-43% selama masa Angkutan Lebaran 2019.
14	Bisnis Indonesia (Halaman, 8)	Selasa, 21 Mei 2019	Pemudik Jatim Batal Memanfaatkan Tol Trans-Jawa	Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkirakan ada kenaikan jumlah pemudik dari Jatim sebesar 3%-4% dibandingkan dengan periode mudik tahun lalu, dengan potensi terbesar menggunakan jalur tol Trans-Jawa.
15	Bisnis Indonesia (Halaman, 10)	Selasa, 21 Mei 2019	"Investasi Tol Masih Sangat Menarik"	Jalan tol tidak hanya berfungsi memperlancar distribusi barang dan jasa dari satu daerah ke daerah lainnya, tetapi juga bisa berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsep pengembangan kawasan dan modernisasi jalan tol. Tugas itu layak dibebankan kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).
16	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)	Selasa, 21 Mei 2019	Pemindahan Ibukota: Para Ahli Siapkan Rencana Aksi	Ahli perencanaan, arsitektur, dan perancangan kota menyiapkan rencana aksi untuk memberi masukan kepada pemerintah berkaitan dengan relokasi ibukota negara.

Judul	<b>Ratusan Km Tol Trans Sumatra Difungsikan</b>	Tanggal	Selasa, 21 Mei 2019
Media	Republika (Halaman 1)		
Resume	Sejumlah ruas Tol Trans Sumatra akan dioperasikan secara fungsional selama arus mudik dan Lebaran 2019. Keberadaan tol fungsional dibutuhkan untuk menyambung ruas tol yang telah resmi beroperasi. Ini untuk mempermudah dan mempercepat pemudik dari Jawa berlebaran di kampung halamannya.		

# Ratusan Km Tol Trans Sumatra Difungsikan

- RAHAYU SUBEKTI  
MURSALIN YASLAND

JAKARTA — Sejumlah ruas Tol Trans Sumatra akan dioperasikan secara fungsional selama arus mudik dan Lebaran 2019. Keberadaan tol fungsional dibutuhkan untuk menyambung ruas tol yang telah resmi beroperasi. Ini untuk mempermudah dan mempercepat pemudik dari Jawa berlebaran di kampung halamannya.

Korlantas Polri, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah meninjau kesiapan Trans Sumatra pada pertengahan Mei. Peninjauan juga dilakukan untuk memetakan potensi kemacetan.



**Polri Petakan Titik Kemacetan**

**Hlm- 9**

Kabag Operasional Korlantas Polri Kombes Pol Benyamin mengatakan, berdasarkan peninjauan, Tol Trans Sumatra yang sudah beroperasi secara resmi siap digunakan untuk mudik.

Akan ada pula tol fungsional yang bisa digunakan untuk mudik, yaitu Tol Terbanggi Besar hingga Palembang.

"Pak Menteri (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono) memberikan jaminan H-10 sudah selesai (proses pembangunan). Sehingga, yang mau mudik ke Palembang bisa, paling tidak seperti dua tahun lalu, seperti Tol Pejagan-Malang (tol fungsional)," kata Benyamin dalam acara diskusi "Mudik Aman dan Lancar" di Jakarta, Senin (20/5).

Judul	Rumah Menteri Pun Ikut Tergusur Proyek Tol	Tanggal	Selasa, 21 Mei 2019
Media	Republika (Halaman 24)		
Resume	Kediaman Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terpaksa harus ikut tergusur. Pasalnya, Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) akan melintas di area rumahnya itu. Padahal, proyek tol tersebut berada di bawah naungan kementeriannya sendiri.		

## Rumah Menteri Pun Ikut Tergusur Proyek Tol

Kediaman Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terpaksa harus ikut tergusur. Pasalnya, Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) akan melintas di area rumahnya itu. Padahal, proyek tol tersebut berada di bawah naungan kementeriannya sendiri.

Rumah Basuki berada di Kompleks Pengairan Rawa Semut, Blok A Nomor 18, RT 04 RW 12, Kelurahan Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Rumah dengan cat warna hitam ini akan dilintasi Tol Becakayu Seksi 2B untuk menghubungkan tol tersebut hingga mencapai Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi.

Wilayah rumah Basuki ini berada dekat dengan Kalimalang. Kompleks perumahan itu masih cukup asri dengan dominan pepohonan.

Sementara itu, rumah Basuki tampak juga dihiasi dengan tumbuh-tumbuhan. Rumah itu terbilang sederhana untuk seorang menteri. Luasnya sekitar 200 meter persegi.

Rumah itu dibatasi pagar besi berwarna hitam setinggi 1,5 meter. Sementara itu, pintu rumah tersebut merupakan pintu kayu yang dicat cokelat.

Rumah yang dominan warna gelap itu tampak sepi. Tak banyak aktivitas di sana. Pagarnya terkunci rapat. Rumah itu sudah jarang ditempati Basuki sejak ia menjadi menteri di Kabinet Kerja sejak 2014.

Petugas keamanan rumah, Indra, mengatakan, Basuki hanya datang ke rumah itu jika ada acara keluarga, acara RT, ataupun undangan dari tetangga. Selebihnya, bapak tiga anak itu menetap di rumah dinas menteri di Jakarta.

Indra menceritakan, akibat kesibukan Basuki sebagai menteri, ia jarang mampir lagi ke rumahnya di Bekasi itu. "Orang baik dan bergaul, sederhana juga. Tapi, ya itu karena sibuk jadi menteri, jadi lebih banyak kegiatannya di luar," kata Indra yang sudah enam tahun bekerja di rumah sang menteri.

Indra menjelaskan, rumah itu

memiliki dua lantai dan memiliki enam kamar tidur. "Kalau luas memang sekitar 200 meter."

Dengan luas rumah sebesar itu, Indra mengaku setiap harinya menjaga bergiliran sebanyak tiga orang petugas. Tak ada orang lain lagi di rumah itu bahkan pembantu karena memang anak-anak Basuki pun tak menetap di sana.

Terkait penggusuran, Indra mengaku memang sudah mengetahuinya. Namun, ia tak tahu detail terkait masalah tersebut. "Iya itu rumahnya, pagar hitam. Sepi karena sudah jarang *ditinggalin*. Paling ada satpam saja dua orang yang *nempati*," kata ketua RT setempat, Helmi Kamara, belum lama ini.

Menurut Helmi, Basuki telah menetap di sana sejak tahun 1990. Perumahan di sana, kata dia, memang banyak dihuni pensiunan Kementerian PUPR.

Dia pun mengaku sudah mengetahui rumah Basuki yang terkena gusur proyek Tol Becakayu. Menurut dia, hingga saat ini belum ada

surat resmi terkait penggusuran itu. "Itu memang sudah lama rencananya, tapi surat resmi belum ada sampai sekarang," kata Helmi.

Dia mengaku beberapa bulan yang lalu memang ada orang yang datang ke perumahan tersebut untuk mengukur-ukur luas tanah. "Sekitar awal 2019 kita sudah pernah dipanggil Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi untuk bahas amdal, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya bagaimana," kata dia.

Warga memang mengetahui rencana penggusuran itu dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, bukan dari Basuki. Menurut salah seorang tetangga Basuki, Aan Darmawan (48), sang menteri tak pernah bercerita soal kawasan perumahan itu akan tergusur proyek tol.

"Waktu pilkada 2018 dan tahun 2019 ini ada tetangga yang meninggal, Pak Basuki datang tapi *gak* pernah singgung atau bicara soal penggusuran," kata Aan.

Hingga saat ini, menurut Aan, sebenarnya belum jelas kapan rumah

sang menteri akan mulai digusur. Tentu prosesnya masih panjang karena terkait sosialisasi dan penggantian nilai tanah.

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi menyebut, nilai jual objek pajak (NJOP) di kawasan perumahan milik Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kota Bekasi sekitar Rp 3 jutaan per meter.

"Tapi itu *kan* hanya NJOP tanah saja, belum hal lainnya," kata Kepala Seksi Perencanaan dan Pengadaan Lahan Disperkimtan Kota Bekasi, Usman Sufirman.

Usman menerangkan, nilai ganti rugi sebuah rumah itu akan dihitung dari berbagai aspek, seperti bangunannya, pohon yang ada, termasuk nilai kenyamanan yang didapatkan penghuni di rumah itu.

"*Kan* ada tim *appraisal* yang akan menentukan harga ganti rugi. Itu tim independen yang ditunjuk pemerintah pusat, bukan Pemerintah Kota Bekasi," kata Usman.

■ *lebrayan a ed: erik purnama putra*

Judul	<b>Berita Foto</b>	Tanggal	Selasa, 21 Mei 2019
Media	Media Indonesia (Halaman 2)		
Resume	Presiden Joko Widodo bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua dari kiri), Gubernur NTT Viktor Laiskodat (kedua dari kanan), dan Bupati Belu Willy Lay (kiri) menebar benih ikan pada peresmian Bendungan Rotiklot di Belu, Atambua NTT, kemarin. Bendungan yang dibangun di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste itu mampu mengairi 139 hektare area persawahan dan 500 hektare tanaman palawija serta mengalirkan 40 liter per detik kebutuhan air baku bagi warga Kota Atambua.		



ANTARA/YULIUS SATRIA WIJAYA

**TEBAR BENIH IKAN DI BENDUNGAN ROTIKLOT:** Presiden Joko Widodo bersama Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono (kedua dari kiri), Gubernur NTT Viktor Laiskodat (kedua dari kanan), dan Bupati Belu Willy Lay (kin) menebar benih ikan pada peresmian Bendungan Rotiklot di Belu, Atambua, NTT, kemarin. Bendungan yang dibangun di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste itu mampu mengairi 139 hektare area persawahan dan 500 hektare tanaman palawija serta mengalirkan 40 liter per detik kebutuhan air baku bagi warga Kota Atambua.

Judul	<b>Presiden Makmurkan Warga NTT dengan Air</b>	Tanggal	Selasa, 21 Mei 2019
Media	Media Indonesia (Halaman 2)		
Resume	Presiden Joko Widodo menekankan kunci kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat NTT ialah air. Dengan air, masyarakat bisa menanam sendiri bahan kebutuhan pokok mereka, bahkan bisa mengekspor ke negara tetangga, Timor Leste.		

# Presiden Makmurkan Warga NTT dengan Air

PRESIDEN Joko Widodo menekankan kunci kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) ialah air. Dengan air, masyarakat bisa menanam sendiri bahan kebutuhan pokok mereka, bahkan bisa mengekspor ke negara tetangga, Timor Leste.

"Kuncinya di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah air. Dengan air itulah bisa menanam bawang merah dan cabai yang banyak, bayam, jagung, pisang, padi, dan pepaya," kata Jokowi saat meresmikan Bendungan Rotiklot di Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, kemarin.

Presiden meminta masyarakat langsung memanfaatkan air yang ada di bendungan. Pengisian air Bendungan Rotiklot sudah dilakukan sejak Desember 2018. Menurut Jokowi, pembangunan bendungan butuh waktu sekitar 3-5 tahun. "Kalau nggak dibuat (dibangun), tidak ada air."

**"Kuncinya di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah air. Dengan air itulah bisa menanam bawang merah dan cabai yang banyak, bayam, jagung, pisang, padi, dan pepaya."**

**Joko Widodo**  
Presiden RI

Rotiklot merupakan bendungan kedua dari tujuh bendungan yang dibangun di NTT pada periode 2015-2019. Sebelumnya, Jokowi meresmikan Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang dan selanjutnya Bendungan Napun Gete, Temef, Mbay, dan Manikin. Bendungan Napun Gete, yang dibangun di Kabupaten Sikka, dijadwalkan rampung pada 2020, menyusul Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Bendungan Kolhua yang tadinya direncanakan diba-

ngun di Kota Kupang akan dipindahkan ke Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang.

Saat menyampaikan sambutan, Jokowi mengatakan NTT mendapat jatah tujuh bendungan sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi masalah air di daerah. Jumlah itu lebih banyak daripada provinsi lain. Ditegaskan, rumus pembangunan di NTT memang dimulai dari air. Dengan air, panen sekali bisa jadi dua atau tiga kali.

"Dulu yang tidak bisa tanam apa-apa, bisa tanam apa-apa. Tanam padi dan jagung di musim hujan, dan di musim kemarau tanam semangka dan melon. Setelah ada air, kita bisa berpikir apa yang akan kita tanam. Kita harus mencari jalan keluar agar kesejahteraan dan kemakmuran kita raih bersama-sama," ujar Presiden.

Bendungan Rotiklot dengan kapasitas 3,3 juta meter kubik air juga bisa dipakai untuk pembangkit listrik tenaga air. Peresmian bendungan dihadiri antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Gubernur NTT Viktor Laiskodat.

Warga setempat pun menyambut baik karena pemerintah membangun bendungan yang nantinya dapat digunakan untuk mengairi sawah mereka. "Saya sangat bersyukur karena Pak Jokowi bisa membangun bendungan di daerah ini. Sangat bermanfaat buat kami," ucap Lius, warga.

Dia mengaku menggarap sawah sekitar 1 hektare, tetapi hanya bisa diolah saat musim hujan. Lius pun yakin dengan beroperasinya Bendungan Rotiklot sebagai sumber pengairan, ia tak perlu bergantung pada musim untuk mengolah sawah. (PO/Ant/X-8)

Judul	<b>Berita Foto</b>	Tanggal	Selasa, 21 Mei 2019
Media	Media Indonesia (Halaman 6)		
Resume	<p>Jalur alternatif mudik lintas barat Jambi-Sumbar di Petajen, Bajubang, Batanghari, Jambi, kemarin. Jalur lintas barat yang menghubungkan Kota Jambi-Muarojambi-Batanghari tersebut dapat digunakan pemudik dari arah Kota Jambi menuju Padang, Sumatra Barat, atau sebaliknya untuk mempersingkat waktu tempuh, tetapi perlu meningkatkan kewaspadaan utamanya pada malam hari karena melintasi perkebunan dan minim lampu penerangan jalan.</p>		



ANTARA IYAHIDI SEPTIYANI

**JALUR ALTERNATIF** : Jalur alternatif mudik lintas barat Jambi-Sumbar di Petajen, Bajubang, Batanghari, Jambi, kemarin. Jalur lintas barat yang menghubungkan Kota Jambi-Muarojambi-Batanghari tersebut dapat digunakan pemudik dari arah Kota Jambi menuju Padang, Sumatra Barat, atau sebaliknya untuk mempersingkat waktu tempuh, tetapi perlu meningkatkan kewaspadaan utamanya pada malam hari karena melintasi perkebunan dan minim lampu penerangan jalan.

Judul	REI Siap Bangun Ibukota Baru	Tanggal	Selasa, 21 Mei 2019
Media	Media Indonesia (Halaman 19)		
Resume	Pemerintah perlu melibatkan pemangku kepentingan yang ahli pada tiap-tiap bidang, termasuk pelaku usaha dalam pengembangan ibukota baru.		

*Pemerintah perlu melibatkan pemangku kepentingan yang ahli pada tiap-tiap bidang, termasuk pelaku usaha dalam pengembangan ibu kota baru.*

# REI Siap Bangun Ibu Kota Baru

FETRY WURYASTI  
fetry@mediaindonesia.com

**P**RESIDEN Joko Widodo akan memindahkan pusat pemerintahan ke luar Pulau Jawa. Beberapa provinsi sedang dalam pembahasan untuk ditetapkan menjadi pusat pemerintahan. Terkait dengan hal itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan tahap pembangunan ibu kota baru bakal terdiri atas dua fase, pertama 2024-2030 dan kedua 2030-2045.

Fase pertama berupa zonasi kawasan inti pusat pemerintahan (sekitar 2.000 hektare). Di kawasan tersebut dilakukan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pusat pemerintahan serta pembangunan fungsi utama, seperti istana, kantor lembaga negara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, taman budaya, juga *botanical garden*.

Selain itu, ada zona kawasan ibu kota negara (sekitar 40 ribu ha). Di kawasan tersebut akan dibangun fungsi pendu-

kung seperti gedung dan perumahan ASN, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta fasilitas penunjang, seperti sarana dan prasarana universitas, *science and techno park, hi-tech and clean industries, R&D center, MICE/convention center, sport center*, dan museum.

Fase kedua berupa Zonasi Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara (IKN) 1 (sekitar 200 ribu ha) akan dilakukan klaster permukiman non-ASN, *national park*, konservasi orang utan/kebun binatang, bandara, dan pelabuhan. Untuk Zonasi Perluasan IKN, sekitar 200 ribu ha dikembangkan metropolitan dan wilayah pengembangan terkait dengan wilayah provinsi sekitarnya.

## Peran swasta

Terkait dengan rencana tersebut, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata berharap pemerintah melibatkan pemangku kepentingan yang ahli pada tiap-tiap bidang, termasuk pelaku usaha dalam pengembangan ibu kota baru.

Menurutnya, pemerintah selaku kepala proyek harus bisa menentukan peran tiap *stakeholders*, seperti pihak swasta, akademisi atau peneliti, BUMN, dan perbankan. REI, kata Soelaeman, sudah diajak dialog sekitar empat kali oleh Bappenas untuk penggambaran pengalaman REI membangun kota baru.

"Dari swasta bisa berperan, kami siap. Tinggal berbagi tugas saja di mana-mananya. Pengusaha tentunya tertarik karena nantinya ada *captive market* yang menjadi pasar," ujar Soelaeman saat dihubungi, kemarin.

Eman, sapaan akrab Soelaeman, menjelaskan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan kota baru. Antara lain, adanya jaminan keamanan (*secure*) tersedianya tanah sehingga pemerintah perlu mengendalikan tata ruang dan mengimplementasikan tata ruang tersebut dengan baik. Perencanaan tanah juga mencakup tahapan pembangunan proyek di setiap lokasi.

"Termasuk tanah untuk pengembangan

oleh swasta sehingga swasta tidak berspekulasi untuk membeli," jelas Soelaeman.

Ia pun mengungkapkan perlu adanya regulasi terkait dengan perizinan agar pelaksanaan proyek memiliki kejelasan landasan hukum. Pemerintah juga harus mendesain pengelolaan ibu kota baru setara dengan pemerintah kota (pemkot) atau dibentuk badan pengelola (BP) seperti Batam.

Ia juga mengusulkan agar ibu kota baru tidak jauh dari pelabuhan sehingga biaya logistik tidak membengkak. Namun, lanjut Eman, REI menyerahkan pertimbangan kriteria global ke pemerintah, mulai politik, keamanan, ekonomi, dan sosial, termasuk infrastruktur utama.

Di sisi lain, Peneliti Pusat Studi Perkotaan Nirwono Joga menjelaskan pemindahan ibu kota butuh perencanaan jangka panjang, yakni 50-100 tahun. "Banyak pekerjaan rumah yang harus disiapkan agar terencana matang, penuh kehati-hatian, dan berkelanjutan," kata Nirwono. (S-1)

Judul	<b>Lintas Timur Sumatera: Perbaikan Selesai Sebelum Masa Mudik</b>	Tanggal	Selasa, 21 Mei 2019
Media	Kompas (Halaman 1)		
Resume	Jalan Lintas Timur Sumatera menjadi jalur alternatif dan rute pengalihan bagi pemudik yang tidak menggunakan jalan tol. Meski demikian, masih ada jalan rusak yang mengganggu laju kendaraan. Perbaikan jalan pun berpacu dengan akan dimulainya masa mudik Lebaran.		

## LINTAS TIMUR SUMATERA

# Perbaikan Selesai Sebelum Masa Mudik

**BANDAR LAMPUNG, KOMPAS** — Jalan Lintas Timur Sumatera menjadi jalur alternatif dan rute pengalihan bagi pemudik yang tidak menggunakan jalan tol. Meski demikian, masih ada jalan rusak yang mengganggu laju kendaraan. Perbaikan jalan pun berpacu dengan akan dimulainya masa mudik Lebaran.

Selama perjalanan Bakauheni-Palembang sepekan terakhir, kerusakan parah terlihat di beberapa tempat dari Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, ke Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Kerusakan juga berlanjut dari Mesuji hingga Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kerusakan juga terjadi di rute Palembang, Sumatera Selatan, ke arah Provinsi Jambi.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sugiartanto mengatakan, saat ini pekerja disebar di Lintas Timur Sumatera untuk menutup lubang dengan aspal. Penanganan darurat dilakukan agar 10 hari menjelang Lebaran atau H-10 sudah dapat digunakan pemudik dengan baik.

"Lubang ditutup dulu dan, yang penting, pemudik bisa menggunakannya," kata Sugiartanto sesuai diskusi "Mudik Aman, Nyaman, dan Lancar", di Jakarta, Senin (20/5/2019).

Jalan Lintas Timur (Jalintim) akan menjadi rute pengalihan saat tol penuh. Menyusul ruas Bakauheni-Terbangi Besar, Jalan Tol Trans-Sumatera Terbanggi Besar-Palembang dibuka fungsional pada 29 Mei 2019 atau 7 hari sebelum Idul Fitri.

Menurut Sugiartanto, perbaikan di Jalintim hanya dapat dilakukan dengan cara tambal sulam. Alasannya, proses kontrak pengerjaan Jalintim masih berlangsung.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) V Palembang Saiful Anwar mengatakan, sebelum perbaikan dilakukan, tercatat sekitar 2.500 lubang dengan kedalaman yang beragam berada di sepanjang Jalintim di Sumatera Selatan. Perbaikan yang masih berlangsung mengurangi jumlah lubang sehingga kini tinggal sekitar 600 lubang. Perbaikan ditargetkan menutup 80 persen kerusakan hingga H-10.

(Sambungan dari halaman 1)

Banyaknya lubang di Jalintim, menurut Sugiartanto, disebabkan ada banyak truk dengan beban melebihi batas dan dimensi truk. Hal ini diperparah drainase yang buruk sehingga aliran air tak sempurna.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIX Bandar Lampung Muh Insal U Maha menjelaskan, fokus perbaikan berada di ruas Bujung Tenuk (Tulang Bawang) hingga Simpang Pematang (Mesuji) sejauh 80 kilometer. Di ruas ini dilakukan perbaikan sepanjang 36 kilometer.

Di Desa Bumi Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, lebih kurang 3 kilometer Jalintim rusak. Warga Bumi Agung, Ayut (42), mengatakan, jalan itu mulai rusak sekitar lima bulan lalu, tetapi perbaikan baru saja dilakukan.

### Rawan macet

Selain akibat jalan rusak, pasir tumpah juga membuat jalur ini makin rawan macet. Di Jalintim di Sumsel, setidaknya ada empat pasar tumpah, yaitu Meranjat, Simpang Indralaya, Betung, dan Bayung Lincir.

Akhir pekan lalu, kecepatan kendaraan di Jalintim rata-rata

50 kilometer per jam, sementara di Jalan Tol Trans-Sumatera kecepatan rata-rata 100 kilometer per jam. Kondisi yang sama terjadi di Jalintim Palembang arah perbatasan Jambi.

Dengan kondisi jalan rusak, perjalanan membutuhkan waktu sekitar 12 jam. Padahal, dalam kondisi jalan yang baik, jarak itu bisa ditempuh 5-7 jam saja. Bakauheni-Palembang, misalnya, ditempuh 14 jam lewat Jalintim, sementara melalui tol sekitar 7 jam.

Secara terpisah, CEO Toll Road Business Group Astra Infra Group Krist Ade Sudyono mengatakan, antusiasme masyarakat untuk menggunakan jalan tol sangat besar. Maka,antisipasi di tiap ruas tol mesti dilakukan karena setiap jalan tol memiliki karakteristik berbeda. (RAM/AIN/IRE/VIO/NAD)



(Bersambung ke hlm 11 kol 1-5)

Judul	<b>Rumah Subsidi: Menyejahterakan Rakyat</b>	Tanggal	Selasa, 21 Mei 2019
Media	Kompas (Halaman 13)		
Resume	Pangan, sandang dan papan adalah kebutuhan dasar sekaligus tolok ukur kesejahteraan sebuah bangsa. Sementara tujuan dibentuknya negara salah satunya menyejahterakan rakyat.		

## RUMAH SUBSIDI

### Menyejahterakan Rakyat

**P**angan, sandang, dan papan adalah kebutuhan dasar sekaligus tolok ukur kesejahteraan sebuah bangsa. Sementara tujuan dibentuknya negara salah satunya menyejahterakan rakyat.

Patut disyukuri, kebutuhan papan sebagian masyarakat Indonesia bisa dipenuhi melalui subsidi berskema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang kini menginjak tahun ke-9. Dana FLPP yang telah disalurkan mencapai Rp 40,46 triliun dan sampai dengan Mei 2019 rumah yang telah dibiayai 615.716 unit. Angka ini belum termasuk subsidi selisih bunga (SSB) yang disalurkan sejak 2017 dan telah membiayai ratusan ribu rumah subsidi.

SSB bukanlah dana bergulir seperti FLPP. Artinya, dana SSB "habis" setiap tahun. Sementara FLPP dirancang agar pada titik tertentu program tak lagi memerlukan asupan APBN. Namun, batas dana bergulir FLPP agar tidak perlu lagi kucuran APBN tidak jelas meski setiap tahun dana yang dikucurkan triliunan rupiah.

Salah satu sebabnya, masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran terus bertambah. Selain itu, ada faktor lain yang memengaruhi harga dan jumlah rumah subsidi yang bisa dibiayai, yakni bunga kredit bank, harga material, dan harga lahan.

Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) digadang-gadang menjadi solusi pembiayaan jangka panjang. Namun, bertumpu sepenuhnya pada UU Tapera yang kemudian melahirkan Badan Pengelola Tapera juga tidak tepat. Sebab, saat ini cakupan program masih terbatas pada pegawai negeri sipil (PNS).

Rumah subsidi yang terjangkau masyarakat berpenghasilan rendah lokasinya jauh dari pusat kota. Akibatnya, beban pembeli bertambah. Bukan hanya angsuran kredit, melainkan juga ongkos transportasi yang tidak sedikit. Di sisi lain, dengan harga rumah yang dipatok pemerintah, pengembang mencari lahan yang semurah mungkin. Tujuannya seluruh biaya produksi tetap di bawah harga patokan.

Sementara itu, kekurangan hunian (*backlog*) paling besar terjadi di perkotaan. Dengan lahan yang terbatas, penduduk kota terus bertambah karena urbanisasi. Laju urbanisasi selama 1960-2014 rata-rata 4,4 persen per tahun. Pada 2015, sebanyak 52 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan dan akan terus meningkat. Dengan kenyataan ini, mengapa program subsidi rumah hanya berkatut di pembiayaan dan menyerahkannya pada mekanisme pasar?

Rumah perlu lahan. Sementara harga lahan sangat tinggi, seolah tidak terkendali. Lahan telah ditempatkan sebagai komoditas dan kehilangan fungsi sosialnya. Di Jakarta dan sekitarnya, rata-rata kenaikan harga tanah selama 2010-2014 mencapai 24,54 persen. Harga rumah pun melambung tinggi meski ada unsur spekulasi untuk mendapat untung tinggi sebagai pendorongnya. Masyarakat berpenghasilan rendah pun terdampak: rumah subsidi kian terpinggirkan.

Padahal, Undang-Undang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa pemerintah perlu lebih berperan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang kurang memperhatikan keseimbangan bagi kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah mengakibatkan kesulitan bagi mereka untuk memperoleh hunian yang layak dan terjangkau.

Akan tetapi, sampai sekarang belum ada rencana induk penyediaan perumahan untuk dijalankan secara nasional. Pemerintah hanya berkatut di sisi hilir dengan terus menyediakan subsidi yang tampak seperti menggarami lautan tanpa masuk ke masalah dasarnya, yaitu lahan.

Padahal, mekanisme ini justru semakin memperdalam ketimpangan, sementara keuntungan finansial justru dinikmati pihak pengembang, perbankan, bukan masyarakat berpenghasilan rendah.

Apakah hal ini akan diteruskan?

(NOBERTUS  
ARYA DWIANGGA  
MARTIAR)



Judul	Habitat Gajah Prioritas di Jalan Lingkar Luar Duri	Tanggal	Selasa, 21 Mei 2019
Media	Kompas (Halaman 16)		
Resume	Pembangunan proyek jalan lingkar luar di wilayah Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau, sepanjang 33 kilometer berkomitmen tidak mengganggu jalur lintasan gajah liar. Gajah-gajah itu ada di kawasan eks Suaka Margasatwa Balai Raja yang kian terdesak habitatnya.		

## INFRASTRUKTUR DAERAH

# Habitat Gajah Prioritas di Jalan Lingkar Luar Duri

**PEKANBARU, KOMPAS** — Pembangunan proyek jalan lingkar luar di wilayah Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau, sepanjang 33 kilometer berkomitmen tidak mengganggu jalur lintasan gajah liar. Gajah-gajah itu ada di kawasan eks Suaka Margasatwa Balai Raja yang kian terdesak habitatnya.

Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Bengkalis Diongi mengatakan, tahun ini hutan Talang belum akan dibuka untuk jalur jalan lingkar luar. Pekerjaan hanya pengaspalan dan pekerjaan lain di lokasi lain yang tertunda lama.

Soal koridor gajah, Dinas PU Bengkalis bakal berkoordinasi dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau. Mereka akan meminta nasihat BBKSDA terkait koridor itu.

"Kami juga sangat khawatir dengan populasi gajah di Duri. Tidak ada niatan kami merusak hutan Talang. Kami akan ajak BBKSDA Riau turun ke lapangan. Kalau memungkinkan, kami akan cari alternatif membangun trase jalan tanpa mengganggu koridor gajah. Kalau tak ada alternatif, kami kemungkinan ikut membangun *underpass* seperti pihak tol," kata Diongi, Senin (20/5/2019).

Habitat gajah di utara SM Balai Raja terancam ruas Jalan

Tol Pekanbaru-Dumai di seksi 4 (Minas Utara-Duri Selatan). Pihak Kementerian PUPR dan PT Hutama Karya sebagai pelaksana pembangunan bersedia membangun jalur lintasan satwa di bawah jalan tol.

Kemarin, puluhan aktivis lingkungan Riau berunjuk rasa di areal kerja kamp alat berat di ruas Jalan Lingkar Luar Duri, Kecamatan Mandau, Bengkalis. Mereka mencegah perusakan jalur koridor gajah liar tersisa.

"Sekarang masih ada enam gajah di hutan Talang di kawasan eks SM Balai Raja bagian selatan. Mereka selalu berpindah ke utara melalui koridor satwa yang terbentuk ratusan tahun. Jika Jalan Lingkar Luar Duri tetap dibangun, otomatis koridor itu akan rusak," kata Koordinator Rimba Satwa Foundation (RSF), Zulhusni Syukri.

Selain RSF, antara lain ada Hipam, Sahabat Alam, Serdadu Alam, Tembakul, dan Lalang.

Sekarang, kata Zulhusni, enam gajah itu masih di kompleks perumahan Chevron di dekat hutan Talang. Sudah tiga hari gajah itu di sana, memakan tanaman warga kompleks.

Hutan Talang seluas 250 hektar satu-satunya hutan primer tersisa di Duri. Hutan itu aman dari perambahan karena di berada areal konsesi kilang minyak PT Chevron. (SAH)

Judul	<b>Pemda di NTT Didorong Optimalkan Bendungan</b>	Tanggal	Selasa, 21 Mei 2019
Media	Kompas (Halaman, 17)		
Resume	Pembangunan bendungan merupakan kunci untuk mengatasi kekeringan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di NTT. Bendungan yang dibangun pemerintah pusat dengan dana miliaran hingga triliunan rupiah itu menjadi tidak berarti jika pemerintah daerah tidak memanfaatkannya secara optimal bagi kemakmuran rakyat.		

# Pemda di NTT Didorong Optimalkan Bendungan

Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, yang dibangun dengan anggaran pemerintah senilai Rp 497 miliar.

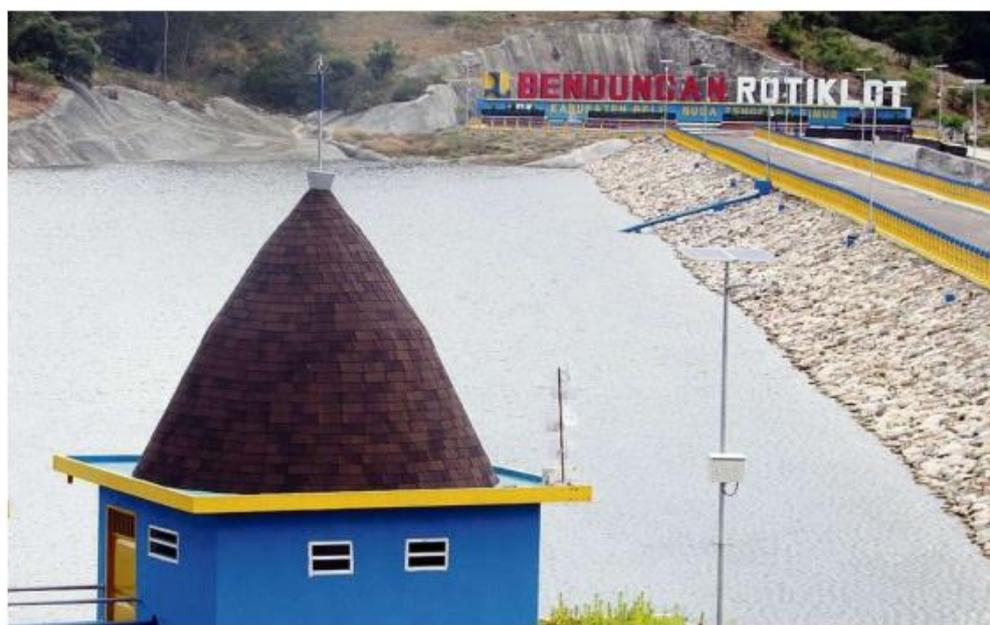
ATAMBUA, KOMPAS — Pembangunan bendungan merupakan kunci untuk mengatasi kekeringan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di Nusa Tenggara Timur. Bendungan yang dibangun pemerintah pusat dengan dana miliaran hingga triliunan rupiah itu menjadi tidak berarti jika pemerintah daerah tidak memanfaatkannya secara optimal bagi kemakmuran rakyat.

"Kesejahteraan masyarakat harus meningkat. Bendungan-bendungan sudah ada dan sebagian dalam proses pengerjaan. Sekarang tinggal pemprov, pemkab, dan pemkot serta masyarakat NTT merealisasikan pemanfaatan air bendungan itu," kata Presiden Joko Widodo saat meresmikan Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu, NTT, Senin (20/5/2019).

Peresmian turut dihadiri Gubernur NTT Viktor Laiskodat, Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno, dan sejumlah pejabat di daerah.

Bendungan Rotiklot merupakan salah satu dari 49 bendungan baru di Tanah Air, yang dibangun oleh pemerintah pada periode 2015-2019. Khusus di NTT yang wilayahnya sebagian besar kering, pemerintah membangun tujuh bendungan, yakni Bendungan Raknamo, Rotiklot, Napun Gete, Temef, Manikin, Mbay, dan Welekis.

Rotiklot merupakan bendungan kedua yang rampung dibangun di NTT setelah Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang yang diresmikan awal Januari 2018. Rotiklot memiliki daya tampung hingga 3,30 juta meter kubik, dengan luas genangan 29,91 hektar, dan tampungan efektif 2,33 juta meter kubik. Pembangunan bendungan yang dimulai sejak Desember



**Bendungan Rotiklot** di Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, yang hari Senin (20/5/2019) diresmikan Presiden Joko Widodo terisi air hujan sejak Desember 2018. Bendungan ini jadi tumpuan harapan warga perbatasan RI-Timor Leste.

ber 2015 itu menelan dana hingga Rp 497 miliar.

Air dari Bendungan Rotiklot dirancang bisa mengairi hingga 149 hektar lahan pertanian. Selain itu, bendungan ini juga bisa dipakai untuk pembangkit listrik tenaga air, tempat wisata, dan air baku penduduk di Kabupaten Belu yang berbatasan dengan Timor Leste.

Setelah air tersedia, Presiden berharap pemda bisa memberdayakan masyarakat untuk menanam beragam komoditas, se-

perti padi, jagung, bawang merah, pepaya, pisang, semangka, dan melon. Dengan tersedianya air, petani juga bisa panen lebih dari sekali dalam setahun.

"Kalau airnya ada, (selanjutnya) kita berpikir apa yang akan kita tanam. *Step by step* kita harus mencari jalan keluar agar kesejahteraan dan kemakmuran betul-betul bisa diraih bersama," kata Presiden yang pada peresmian itu juga menabur 200.000 benih ikan, serta men-

nis pohon, seperti kelor, pule, beringin, gamal, juwet, dan flamboyan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, yang turut mendampingi Presiden, mengatakan, pemerintah tidak hanya membangun bendungan, tetapi juga saluran irigasi ke lahan pertanian warga.

Aleksander Seran Briá (56), tokoh masyarakat Belu, mengaku sangat bangga atas keberadaan bendungan di Kecamat-

an Kakuluk Mesak itu. Selama ini, kecamatan tersebut terkenal kering dan gersang. Kawasan ini sebagai salah satu kantong kemiskinan di NTT.

"Saya berharap dengan kehadiran bendungan ini masyarakat bisa memperbaiki kesejahteraan hidupnya," katanya.

Bupati Belu Willy Lay mengatakan, pihaknya segera mendorong warga memanfaatkan air bendungan untuk menanam begitu saluran irigasi selesai dibangun. (KOR/\*)

Judul	<b>Berita Foto</b>	Tanggal	Selasa, 21 Mei 2019
Media	Kompas (Halaman, 20)		
Resume	Panorama Jakarta di area Sudirman, Jakarta Pusat, Senin(20/5/2019) malam. Wajah ibukota terus berkembang menuju megapolitan yang semakin padat. Pemerintah memiliki rencana mereduksi fungsi Jakarta hanya menjadi pusat bisnis dengan memindahkan ibukota ke luar jawa.		

## Pertumbuhan Ibu Kota



KOMPAS/RIZA FATHONI

**Panorama** Jakarta di area Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019) malam. Wajah Ibu Kota terus berkembang menuju megapolitan yang semakin padat. Pemerintah memiliki rencana mereduksi fungsi Jakarta hanya menjadi pusat bisnis dengan memindahkan ibu kota ke luar Jawa.

Judul	<b>Berita Foto</b>	Tanggal	Selasa, 21 Mei 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 1)		
Resume	Presiden Joko Widodo bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, dan Bupati Belu Willy Lay menghadiri peresmian Bendungan Rotiklot di Belu, Atambua, NTT, Senin (20/5).		

### ► RESMIKAN BENDUNGAN ROTIKLOT



Antara/Yulius Satria Wijaya

**Presiden Joko Widodo** (*kanan*) bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (*ketiga kanan*), Gubernur NTT Viktor Laiskodat (*kedua kanan*), dan Bupati Belu Willy Lay (*kiri*) menghadiri peresmian Bendungan Rotiklot di Belu, Atambua, NTT, Senin (20/5). Bendungan Rotiklot

merupakan salah satu dari 49 bendungan baru yang dibangun pada periode 2015-2019. Di NTT, Kementerian PUPR telah menyelesaikan 2 bendungan, yakni Bendungan Raknamo dan Rotiklot, serta 5 bendungan lainnya yang akan atau sedang dibangun, yaitu Bendungan Gete, Mbay, Temef, Welekin, dan Manikin.

Judul	<b>Operator Tol Panen Rezeki</b>	Tanggal	Selasa, 21 Mei 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Astra Infra, subholding PT Astra International Tbk. di sektor infrastruktur, memperkirakan volume lalu lintas atau trafik kendaraan di empat ruas jalan tol bakal meningkat berkisar 15%-43% selama masa Angkutan Lebaran 2019.		

▶ ANGKUTAN LEBARAN 2019

# Operator Tol Panen Rezeki

**Bisnis, JAKARTA**  
— Astra Infra, subholding PT Astra International Tbk. di sektor infrastruktur, memperkirakan volume lalu lintas atau trafik kendaraan di empat ruas jalan tol bakal meningkat berkisar 15%—43% selama masa Angkutan Lebaran 2019.

Rivki Maulana  
rivki.maulana@bisnis.com

Peningkatan dipicu peralihan masyarakat dari menggunakan angkutan moda angkutan udara ke jalan tol Trans-Jawa dan Trans-Sumatra.

CEO Toll Road Business Group Astra Infra Krist Ade Sudiyono mengatakan bahwa masyarakat Indonesia mengalami euforia karena jaringan jalan tol di koridor Trans-Jawa tahun ini tersambung. Begitu pula dengan jalan tol Trans-Sumatra, pemudik bisa melintas di jalan tol dari Lampung hingga Palembang.

"Jadi, masyarakat kita dilanda kebahagiaan. Mereka ingin

▶ **LMS telah menambah 14 gardu dan 10 mobile reader di GT Palimanan Utama.**

▶ **PT Trans Marga Jateng siap menambah 23 gardu di GT Banyu-manik.**



mencoba mudik lewat jalan tol. Di samping memang ada faktor angkutan moda lain [pesawat udara] harganya sedang mahal," jelas Krist, Senin (20/5).

Astra Infra kini memiliki andil di empat ruas jalan tol di koridor Trans-Jawa, yaitu Tangerang—Merak (72,50 kilometer), Cikopo—Palimanan (116,80 kilometer), Semarang—Solo (72,60 kilometer), dan Jombang—Mojokerto (40,50 kilometer). Pekan lalu, Astra Infra mengakuisisi 44,50% saham ruas Surabaya—Mojokerto sehingga total kontribusi Astra Infra di koridor Trans-Jawa mencapai 338,60 kilometer atau 30% dari panjang Trans Jawa.

Krist menjelaskan bahwa Astra Infra melakukan sejumlah persiapan untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas di jalan tol pada masa Angkutan Lebaran 2019.

Dia menyebutkan bahwa tiap-tiap ruas tol memiliki karakteris-

tik khas. Namun, secara umum semua ruas tol bakal menambah kapasitas gardu, personel, dan tempat istirahat.

Di ruas Tangerang—Merak, Astra Infra memastikan bahwa pekerjaan konstruksi pelebaran jalur tidak akan mengganggu lalu lintas di jalan tol.

Direktur Teknik & Operasi PT Marga Mandalasakti Rinaldi mengatakan bahwa perusahaan menambah dua lajur tambahan di gerbang tol (GT) Serang Timur dan GT Merak.

"Kami prediksi lalu lintas meningkat 15,62% dan ini cukup signifikan,"

Dia menambahkan bahwa peningkatan trafik dipicu animo masyarakat untuk melintas di jalan tol Trans-Sumatra.

Saat ini, jalan tol Bakauheni—Terbanggi Besar sudah beroperasi. Selanjutnya, ruas Terbanggi Besar—Pematang Panggang, Pematang

Panggang—Kayu Agung, dan Kayu Agung—Jalabatang bisa digunakan secara terbatas.

Sementara itu, PT Lintas Marga Selayu (LMS) memperkirakan trafik bakal meningkat 12% menjadi 1,73 juta kendaraan selama H-10 hingga H+10 khulifri 1440 Hijriah.

Wakil Direktur Utama LMS Firdaus Azis mengatakan bahwa perusahaan telah menambah 14 gardu dan 10 mobile reader di GT Palimanan Utama untuk mengantisipasi arus lalu lintas selama masa angkutan Lebaran. Walaupun, kapasitas gardu yang siap melayani pemudik mencapai 26 gardu.

"Kami memperkirakan puncak arus mudik akan terjadi pada H-5 [31 Mei 2019], sedangkan arus balik H+3 [9 Juni 2019]," tuturnya.

## SISTEM SATU ARAH

Dia menjelaskan bahwa perusa-

haan juga siap berkoordinasi dengan Korlantas Polri dalam pelaksanaan sistem satu arah (SSA) yang rencananya akan berlaku pada 30 Mei 2019—2 Juni 2019 pada arus mudik. Adapun, pada arus balik, sistem satu arah akan berlaku pada 7 Juni 2019—9 Juni 2019.

Firdaus mengimbau agar para pemudik untuk mencari tempat istirahat di sekitar tol Cipali bila ingin beristirahat dengan optimal. Pasalnya, area di sekitar tol Cipali memiliki destinasi kuliner unggulan yang bisa menjadi pilihan pemudik.

Direktur Administrasi dan Keuangan PT Trans Marga Jateng Umiyanti mengatakan bahwa pihaknya siap menambah 23 gardu di GT Banyuamanik.

Pihaknya juga menyiapkan mobile reader bila terjadi kepadatan di gerbang tol.

"Kami sebetulnya terbantu GT Kolikangkung karena di sana akan

banyak transaksi keluar sehingga di Banyuamanik tidak terlalu padat," terangnya.

Dia menyebutkan bahwa trafik selama masa angkutan Lebaran diperkirakan naik 20%. Trans Marga Jateng, lanjutnya, menyiapkan enam tempat istirahat dan pelayanan (TIP) di jalan tol sepanjang 72,6 kilometer itu.

Sementara itu, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. terus mengoptimalkan layanan di tempat istirahat dan pelayanan di KM 207A pada jalan tol Palimanan—Kanci (Palikanci) saat arus mudik dan balik Lebaran 2019. Optimalisasi layanan tersebut mencakup penambahan fasilitas hingga petugas di lapangan.

Berbagai fasilitas yang tersedia di rest area 207 A antara lain *top up e-Toll*, *ATM mobile*, *BBM modular*, *toilet portable*, posko kesehatan, pos keamanan, serta berbagai rambu penunjang lain.

(Rivki R. Nugroho)

Judul	<b>Pemudik Jatim Bakal Memanfaatkan Tol Trans-Jawa</b>	Tanggal	Selasa, 21 Mei 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 8)		
Resume	Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkirakan ada kenaikan jumlah pemudik dari Jatim sebesar 3%-4% dibandingkan dengan periode mudik tahun lalu, dengan potensi terbesar menggunakan jalur tol Trans-Jawa.		

## Pemudik Jatim Bakal Manfaatkan Tol Trans-Jawa

Bisnis, SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkirakan ada kenaikan jumlah pemudik dari Jatim sebesar 3% - 4% dibandingkan dengan periode mudik tahun lalu, dengan potensi terbesar menggunakan jalur tol Trans-Jawa.

Kepala Dinas Perhubungan Jatim Fattah Jasin mengatakan, pada momen mudik tahun lalu jumlah pemudik dari Jatim tercatat sekitar 5,7 juta orang melalui darat, laut, dan udara. Namun, pada tahun ini diperkirakan ada pergeseran dari menggunakan jalur udara beralih ke jalur darat.

"Dari analisa kami, tahun ini bus akan lebih dilirik karena dianggap lebih cepat dan murah dibandingkan kereta dari Surabaya menuju ke arah barat [Jateng/Jabar] sebab bus akan memanfaatkan jalan tol baru, termasuk kendaraan pribadi. Justru yang pesawat ini sepertinya menurun karena harga tiketnya yang mahal," jelasnya kepada *Bisnis*, Senin (20/5).

Fattah mengatakan, keberadaan jalan tol baru yang sudah menghubungkan Surabaya-Jakarta, Surabaya-Probolinggo dan Surabaya - Singosari Malang ini bakal lebih kuat untuk dilalui karena masyarakat cenderung ingin mencoba kelancaran jalan tol.

"Faktor kenaikan jumlah pemudik lainnya itu karena memang mereka ingin mencoba jalan baru, lalu jadwal libur Lebaran ini juga sangat panjang jadi waktunya sangat cukup untuk lewat darat," imbuhnya.

Untuk pemudik dengan sepeda motor diharapkan bisa berkurang, apalagi Pemprov Jatim sudah menyiapkan angkutan mudik gratis sebanyak 560

bus dengan berbagai tujuan di Jatim.

Mudik gratis tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan PWNNU, Unair, ITS, dan Maspion. Pemerintah juga menyediakan truk untuk mengangkut 500 sepeda motor bagi pemudik yang mengikuti mudik gratis tersebut.

"Sejak pendaftaran *online* dibuka 22 April lalu hingga kini sudah hampir 100% penuh, paling tinggal 200 *seat* atau 4 bus," imbuhnya.

Fattah menambahkan, Dishub Jatim juga menyiapkan 26 titik posko dan area istirahat serta menerjunkan personel untuk ikut mengamankan jalannya arus mudik dan balik. Sejumlah titik yang kerap macet juga perlu diwaspadai akibat lintasan kereta api dan pasar tumpah, seperti di jalur pantai utara dari Gresik-Lamongan-Tuban, di jalur tengah biasanya terjadi di Jombang-Caruban, dan di jalur selatan ada wilayah di Klakah Lumajang-Jember-Banyuwangi.

"Jalur tengah itu tahun lalu menjadi perhatian kami, tapi mudah-mudahan kali ini tidak macet karena sudah ada tol baru, dan angkutan barang juga sudah tidak boleh melintas pada H-3 sampai H + 2 Lebaran jadi diharapkan lancar," imbuhnya.

Kepala Dinas PU Bina Marga Jatim Gatot Sulistyohadi mengatakan, hingga kini pemerintah terus melakukan pekerjaan rekonstruksi jalan-jalan yang rusak sehingga tingkat kemandapan jalan provinsi di Jatim saat ini sudah 90%.

"Pada H-10 Lebaran, pengerjaan rekonstruksi jalan provinsi juga ditargetkan rampung agar tidak mengganggu perjalanan para pemudik," katanya.

(Peni Widarti)

Judul	“Investasi Tol Masih Sangat Menarik”	Tanggal	Selasa, 21 Mei 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 10)		
Resume	Jalan tol tidak hanya berfungsi memperlancar distribusi barang dan jasa dari satu daerah ke daerah lainnya, tetapi juga bisa berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsep pengembangan kawasan dan modernisasi jalan tol. Tugas itu layak dibebankan kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).		

► KEPALA BPJT DANANG PARIKESIT

# “Investasi Tol Masih Sangat Menarik”

*Bisnis, JAKARTA — Jalan tol tidak hanya berfungsi memperlancar distribusi barang dan jasa dari satu daerah ke daerah lainnya, tetapi juga bisa berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsep pengembangan kawasan dan modernisasi jalan tol. Tugas itu layak dibebankan kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Untuk mengetahui lebih dalam mengenai strategi yang dijalankan badan itu, Bisnis berkesempatan mewawancarai Kepala BPJT Danang Parikesit. Berikut petikannya:*

**Bagaimana perkembangan pembangunan jalan tol hingga saat ini?**

Saat ini sudah ada hampir 1.800 kilometer jalan tol yang sudah beroperasi. Ini menjadi tantangan baru sebenarnya, kalau dilihat pada periode 5 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi sebelumnya lebih fokus pada konstruksi dan ekspansi. Sementara itu, sekarang ini kami dihadapkan pada tiga tantangan besar berkaitan dengan jalan tol.

**Apakah tantangan yang dimaksud?**

Yang pertama adalah bagaimana casanya agar 1.800 kilometer jalan tol yang sudah beroperasi betul-betul bisa dioperasikan secara terintegrasi. Baik integrasi fisiknya, maupun integrasi tarif. Tantangan yang kedua adalah untuk jaringan Trans-Sumatra kami masih punya PR [pekerjaan rumah] banyak untuk konstruksi. Total panjangnya itu kan hampir mencapai 3.000 kilometer kalau semuanya terhubung. Dari total tersebut, PT Hutama Karya dapat pemagasan sepanjang 2.700 km. Dari beberapa ruas yang menjadi bagian Trans-Sumatra sudah ada beberapa yang terhubung seperti Lampung-Terbanggi Besar nanti sampai ke Kayu Agung. Inilah PR yang kedua, dan selama 4 tahun periode saya sebagai Kepala BPJT yaitu sampai 2023 untuk menuntaskan pembangunan 2.700 km. Presiden Jokowi juga sudah berpesan agar dari Banda Aceh sampai ke Lampung bisa segera terhubung.

Tantangan yang ketiga adalah modernisasi jalan tol. Pada akhir tahun lalu, kami sudah memiliki konsep yang dinamakan *multi lane free flow*. Dengan konsep tersebut pengguna jalan tol tidak perlu lagi *tapping*. Jadi yang tadinya dari *cash* menjadi *cashless*, tetapi sekarang dari *card* menjadi *cashless*.

**Kapan konsep tersebut akan dijalankan?**

Harapannya pada akhir tahun ini sudah didapatkan konsepnya, dan pada tahun depan diharapkan sudah beroperasi. Sekarang ini ada 3 badan usaha yang melakukan uji coba mengenai *cashless* system ini. Ketiga BUJT [badan usaha jalan tol] tersebut antara lain adalah PT Jasa Marga

Tbk., Astra, dan CMNP.

Kalau Jasa Marga itu uji cobanya di tol Bali, dan Soekarno-Hatta. Kemudian, Astra di tol Tangerang—Merak, sedangkan CMNP masih dalam proses pengajuan lokasi dari sejumlah *gate* itu akan digunakan satu *gate* misalnya akan diuji coba untuk sistem *cashless*. Jadi ini memang salah satu jalan untuk modernisasi.

**Apakah modernisasi juga akan diterapkan pada aspek-aspek lainnya?**

Iya, kami juga dorong modernisasi di berbagai aspek lainnya. Misalnya, saat ini sudah mulai banyak jembatan-jembatan panjang yang membutuhkan *surveillance technology* untuk infrastrukturnya. Kami juga punya akses untuk ribuan akses CCTV. Akan tetapi, kamera CCTV yang ada saat ini sebagian besar bukan yang *analytics*. Kalau CCTV *analytics* kan bisa menangkap dan menginterpretasikan data yang ditangkap seperti nomor pelat, jumlah kendaraan, dan kecepatannya. Nah, hal ini nantinya akan kami ubah *pelan-pelan*.

Modernisasi jalan tol juga berarti *zero fatalities*. Untuk membuat tidak ada kecelakaan sama sekali mungkin agak sulit, tetapi kalau bisa jangan sampai ada yang meninggal. Kalau ada kecelakaan di jalan tol, harus diupayakan agar nyawa pengemudi atau penumpang bisa tertolong.

Oleh karena itu, saat ini sudah mulai dibahas *medical evacuation* dengan menggunakan helikopter, dan di lokasi-lokasi tertentu akan disediakan *helipad*, dan kita dorong agar pelayanan kesehatan tidak hanya akibat kecelakaan bisa disediakan di sepanjang jalan tol.

**Bagaimana respons BUJT terhadap dorongan modernisasi?**

Apa yang kami lakukan ini sebenarnya untuk membantu BUJT agar bisa meningkatkan kelayakan bisnisnya. Kalau arus lalu lintas di jalan tolnya lancar, maka yang diuntungkan bukan hanya BUJT tetapi juga masyarakat. Jalan tol yang paling rugi adalah jalan tol yang jadi tempat parkir, karena tidak bisa menerima *flow* lagi dari masyarakat. Pada intinya, BUJT sangat *support*, karena bisa meningkatkan efisiensi. Yang masih perlu didorong adalah yang berkaitan dengan *safety*. Memang untuk menjalankan program ini butuh biaya, tetapi berkaitan dengan nyawa ini kan tidak ada harganya. BUJT pun sepakat kalau angka kecelakaan dan kematian berkurang, maka *kendibility* dari bisnis mereka akan semakin bagus.

Selain itu, persoalan yang masih menjadi perhatian dari teman-teman di Perhubungan dan Polri adalah *overflow* di jalan tol. Yang tadinya pemeliharaan jalan 5 tahun sekali, sekarang harus 3 tahun sekali. Hal ini menyebabkan *cost* yang tinggi bagi BUJT. Asosiasi Jalan Tol Indonesia [AJTI] bersama BPJT sudah mengadakan rakor untuk bersama-sama mencari solusi untuk persoalan mengenai *overflow*, keselamatan, dan *free flow*.

**Berapa panjang jalan tol yang ditargetkan beroperasi hingga akhir tahun ini?**

Rencananya dalam waktu dekat ini JORR 2 bisa terhubung semuanya. Kemudian, ditambahkan

jalan di Sumatra dari Terbanggi Besar ke Pematang Panggang selanjutnya ke Kayu Agung. Selain itu, ada beberapa ruas juga yang di Sumatra Utara, dan Balikpapan—Samarinda. Kemungkinan, kami perkirakan kalau bekerja keras, dan berjalan sesuai rencana hingga akhir tahun ini panjang jalan tol yang beroperasi bisa mencapai 1.900 km.

**Dari beberapa ruas tol yang dibangun, adakah ruas tertentu yang diprioritaskan pengerjaannya?**

Yang jelas proyek-proyek tersebut yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional [PSN]. Beberapa proyek tersebut seperti jalan tol Cisumdawu [Cileunyi—Sumedang—Dawuan], dan tol JORR 2 yang diprioritaskan pemerintah untuk mengkomodifikasi pergerakan di Jabodetabek. Selain itu, ada ruas-ruas strategis lainnya seperti di Lampung.

**Adakah usulan proyek-proyek jalan tol baru yang diprakarsai swasta?**

Ada sekitar 800 km yang diprakarsai oleh badan usaha. Jadi, ada beberapa Badan Usaha Jalan Tol yang sedang atau sudah mengajukan izin prinsip atau memperoleh izin prakarsa dari Menteri PUPR untuk menambah ruas-ruas jalan baru di luar ruas yang direncanakan pemerintah.

Untuk proyek prakarsa ini ada beberapa tahap. Ada yang baru menyatakan minat, ada yang sudah menyatakan minat dan mendapat izin prinsip untuk melakukan studi kelayakan. Kemudian, ada juga yang mendapat izin prinsip, studi kelayakan, dan mendapat izin prakarsa seperti jalan tol Yogyakarta—Solo yang sudah mendapat izin prakarsa dari Menteri PUPR untuk melakukan kajian lebih lanjut dan data pendukung sebelum ke tahap tender.

**Apakah proyek prakarsa swasta masih didominasi di Jawa?**

Benar, karena

perhitungannya kan murni bisnis, dan tidak mendapat dukungan konstruksi dari pemerintah sebab menjalankan proyek tersebut atas inisiatif mereka sendiri. Meskipun demikian, untuk tanahnya masih disediakan oleh pemerintah.

**Apakah investasi jalan tol di Jawa masih menarik bagi investor?**

Masih sangat menarik, karena sebagai contoh kita masih belum punya jaringan dari Bandung, Tasikmalaya, dan Cilacap. Kemudian, dari Tasikmalaya ke Cilacap, Cilacap ke Purwokerto, Purwokerto ke Yogyakarta. Selain itu, ada minat untuk membangun ke Kediri, dan kebetulan ada juga inisiatif prakarsa dari badan usaha untuk akses ke bandara di Kediri yang disponsori oleh PT Gudang Garam Tbk. Jadi, yang kami dorong ini sebenarnya bukan hanya sekedar pembangunan jalan tol, tetapi juga membangun jalan tol untuk pengembangan kawasan.

**Apakah konsep pengembangan kawasan di sepanjang jalan tol ini sudah bergerak secara masif?**

Kami sudah punya *multi road-nya*, tetapi kami belum pernah merancang hub logistik untuk kawasan perhubungan yang masif itu di mana sih untuk di Pulau Jawa? Di sepanjang jaringan ini harus ada tempat-tempat logistik untuk mengantar barang sampai ke tujuan di kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa atau sebaliknya. Selain itu, di Sumatra juga kami baru bicara dengan Hutama Karya untuk menggabungkan bisnis jalan tol dengan kawasan-kawasan industri, dengan kawasan perkebunan dan pertambangan. Jadi konsep tol sudah bergerak dari yang tadinya semata-mata hanya sebagai infrastruktur jalan, tetapi bisa juga mendorong pembentukan kawasan-kawasan industri baru. Kami juga dorong agar *rest area* bisa dijadikan destinasi wisata, karena ada beberapa ruas tol yang memiliki pemandangan-pemandangan yang indah.

**Apakah akan diberlakukan diskon tarif tol pada arus mudik dan arus balik tahun ini?**

Menteri PUPR berharap ada diskon tarif, tetapi yang sudah-sudah hal ini sifatnya *voluntary*. Tidak ada regulasi khusus, tetapi secara eksplisit Pak Menteri sudah menyampaikan ke AJTI agar ada diskon tarif, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau dilihat pada tahun lalu, umumnya operator bersedia memberikan diskon tarif selama 20 hari yaitu sejak H-10 dan H+10 sebesar 15%. ☑

Pewawancara:  
Riki Maulana,  
Friti Sartina Dewi, &  
Hafiyun

**Biodata**

Nama: Danang Parikesit

**Riwayat pendidikan:**

- Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada
- Transportasi Teknik Universitas Leeds Inggris
- Transportasi Teknik Technische Universität Wien, Austria

**Riwayat Karier:**

- Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR
- Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)
- Staf Ahli Khusus Menteri Pekerjaan Umum
- Sekretaris Jenderal Persatuan Insinyur Indonesia
- Anggota Dewan Direksi Asia Society Studi Transportasi (East)



Judul	<b>Pemindahan Ibukota: Para Ahli Siapkan Rencana Aksi</b>	Tanggal	Selasa, 21 Mei 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)		
Resume	Ahli perencanaan, arsitektur, dan perancangan kota menyiapkan rencana aksi untuk memberi masukan kepada pemerintah berkaitan dengan relokasi ibukota negara.		

## ► PEMINDAHAN IBU KOTA

# Para Ahli Siapkan Rencana Aksi

Bisnis, JAKARTA — Ahli perencanaan, arsitektur, dan perancangan kota menyiapkan rencana aksi untuk memberi masukan kepada pemerintah berkaitan dengan relokasi ibu kota negara.

Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Bernardus Djonoputro menyatakan bahwa relokasi pusat pemerintahan adalah proses konsensus yang panjang.

Menurutnya, kemauan politik yang telah dipaparkan pemerintah masih dianggap kurang cukup.

Relokasi pusat pemerintahan, katanya, membutuhkan tiga aspek utama yakni strategi perencanaan yang visioner, ahli profesi bersertifikat, dan teknokrat yang andal.

"Sebagai sebuah kegiatan perencanaan, relokasi pusat pemerintahan adalah hal yang jamak dilakukan oleh para perencana. Baik *plan as you proceed* maupun mendesain dari nol yang dibangun di atas lahan kosong. Jadi, perlu melakukan strategi yang matang,"

tuturnya dalam sebuah diskusi bersama dengan Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI) dan Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia (IARKI), Senin (20/5).

Bernandus menuturkan bahwa Indonesia masih belum memiliki kebijakan pengembangan kota yang visioner sekaligus komprehensif.

Menurutnya, rencana relokasi harus memiliki elemen kerangka berpikir agar kota ini kondusif untuk bisa mendorong pengambilan kebijakan ekonomi, politik, sosio budaya, serta kemananan dan ketahanan bangsa.

Sekjen IARKI Sibarani Sofian menyatakan bahwa keahlian rancang kota merupakan keahlian multidisiplin dan melibatkan banyak profesi antara lain ahli lingkungan, lanskap, infrastruktur, transportasi berkelanjutan, sosiologi/antropologi kota, dan berbagai ahli lainnya.

"Ini adalah kesempatan Indonesia untuk menunjukkan karya anak bangsa yang mengedepankan karakter dan kearifan lokal, tetapi tetap mem-

pertimbangkan pada kaidah perencanaan universal dan *best practice*," ujarnya.

Pemindahan ibu kota Indonesia yang belum pernah dilakukan diharapkan dapat menjadi kota percontohan yang ideal.

Untuk itu, kata Sibrani, diperlukan suatu terobosan yang tidak hanya layaknya sebuah bisnis (*business as usual*) dan bukan hanya berhenti dalam perencanaan seperti kota hijau, kota berkelanjutan, kota cerdas, melainkan juga berani melihat jauh ke masa depan dengan perkembangan teknologi yang akan mengubah wajah kota.

Ketua Umum IAI Ahmad Djuhana menegaskan bahwa ibu kota negara harus dapat memberi ruang jawaban atas tantangan masa depan. Ibu kota negara harus dapat menjadi cerminan karakter bangsa.

Nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila seharusnya tidak sekadar menjadi metafora dalam tampilan arsitektur atau struktur kotanya, tetapi nilai-nilai tersebut harus da-

pat menjadi napas kehidupan kotanya.

"Cerminan karakter arsitektur kota seharusnya menjadi amunisi utama dalam bersaing dengan ibu kota negara-negara di dunia. Situasi ini dapat menjadi barometer perencanaan kota-kota di Indonesia ke depan dan warga kota menjadi penggerak utamanya," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Sekjen IAI Denny Setiawan mengatakan bahwa sebagai mitra pemerintah pihaknya mendukung sepenuhnya rencana pemindahan ibu kota.

Menurutnya, pemindahan ibu kota membutuhkan proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak sehingga tidak bisa diselesaikan dalam sekejap.

Pernyataan Denny ini sekaligus menyanggah judul berita "*IAI Siap Sulap Calon Ibu Kota Baru*" yang dimuat *Bisnis* edisi 16 Mei 2019 di halaman ini. Untuk itu, *Bisnis* menyampaikan permohonan maaf atas penjudulan yang multitafsir tersebut. (Putri Z. Salsabila/Zufriza)